

Analisis Perumusan Kebijakan Peningkatan Literasi Disekolah SMPN 1 PERCUT SEI TUAN

Ahmadi Hamsa Ramadhan¹, Laudy Livianti², Tamimi Mujahid³, Maya Masita⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Ahmadihamsa38653@gmail.com, mujahidtamimi8@gmail.com, laudysweety@gmail.com,
mayamasita03@gmail.com

Korespondensi : Ahmadihamsa38653@gmail.com

Abstract. *The school literacy movement (GLS) is the result of one of the educational innovations in the field of strategy. The school literacy movement emphasizes literacy activities which include thinking skills using knowledge sources in print, visual, digital and auditorium forms. The implementation of GLS at the MI/SD level is carried out in line with strengthening the Ministry of Education and Culture Regulation (Permendikbud) Number 23 of 2015 concerning Employment Growth in an effort to create a literacy culture. There are several concepts of technical literacy in schools, including: daily, weekly, monthly and per semester.*

Keywords: *education policy, school literacy movement (GLS)*

Abstrak. Gerakan literasi sekolah (GLS) merupakan hasil salah satu inovasi pendidikan di bidang strategi. Gerakan literasi sekolah menekankan pada kegiatan literasi yang mencakup keterampilan berpikir dengan menggunakan sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditorium. Penerapan GLS di tingkat MI/SD dilaksanakan seiring dengan penguatan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pertumbuhan Lapangan Kerja dalam upaya menciptakan budaya literasi. Terdapat beberapa konsep literasi teknis di sekolah antara lain: harian, mingguan, bulanan, dan per semester.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, gerakan literasi sekolah (GLS)

PENDAHULUAN

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berhasil menurunkan angka buta huruf. Data *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2014 mencatat angka melek huruf penduduk Indonesia sebesar 92,8% pada kelompok dewasa dan 98,8% pada kelompok remaja. Data UNDP tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati tahap krisis literasi dalam arti sastra (Saadati & Sadli, 2019). Rendahnya minat membaca tentu sangat berdampak pada rendahnya kemampuan literasi membaca. Siswa membaca tapi belum bisa menangkap makna dari apa yang dibacanya. *Survey Progress in International Reading Literacy Study* (PIRLS) yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia masih menempati urutan bawah jika dibandingkan dengan negara lain.

Gerakan literasi sekolah adalah gerakan dalam upaya menumbuhkan semangat budi pekerti yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 2015, yang bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memiliki budaya membaca dan menulis menciptakan pembelajaran seumur hidup. Indonesia menyatakan keadaan darurat berbunyi, yang mana akan mengkhawatirkan masa depan bangsa (Safitri et al., 2020).

Dengan adanya gerakan literasi, diharapkan pihak sekolah dapat melakukan hal tersebut memfasilitasi secara optimal, adaptasi program penyaringan wajib:

- 1) menerapkan program membaca 15 menit kecuali untuk buku teks pra-pembelajaran dimulai,
- 2) melakukan aktivitas fisik seperti SKJ dilakukan secara berkala dan rutin, setidaknya sekali seminggu oleh seluruh penduduk sekolah (guru, tenaga kependidikan, siswa).

Gerakan Literasi Nasional diharapkan menjadi pendukung keluarga, sekolah, dan masyarakat dari perkotaan hingga ke wilayah terpencil untuk berperan aktif menumbuhkan budaya literasi. Siswa dapat memanfaatkan sudut membaca untuk memperkaya pengetahuannya. Menurut pengamatan penulis terhadap kegiatan magang sekolah dasar, minat membaca dan mengunjungi perpustakaan sekolah rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya waktu siswa untuk membaca buku di perpustakaan dan terbatasnya ruang di perpustakaan sekolah. Hal ini juga sebagai upaya mendekatkan perpustakaan kepada mahasiswa. Sudut membaca dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran (Fransiska, 2020).

Kebijakan pendidikan lahir dari ilmu praktik pendidikan, sehingga mencakup proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Proses kebijakan tersebut dapat menggunakan model yang telah ditetapkan, walaupun model tersebut mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kombinasi berbagai model dapat menghasilkan proses kebijakan yang layak (Al Fath et al., 2018).

Pendidikan diharapkan dapat menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berilmu dan mengembangkan keterampilannya, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan khususnya di bidang sastra. Berdasarkan rendahnya capaian tersebut, DPR menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Martabat Pegawai yang memuat budaya literasi (Risal M , et al., 2023). Permendikbud ini kemudian melahirkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yaitu program untuk menciptakan lingkungan sekolah yang warganya melek huruf.

METODOLOGI PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian tentunya kita harus mengetahui apa itu metode penelitian, metode penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk kegunaan tertentu. Maksud secara ilmiah ini adalah bahwa kegiatan ini bersandar pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, sistematis dan empiris. Pada metode penelitian kali ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang penulis analisis berdasarkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan kepada narasumber yang didapat melalui wawancara

langsung yang hasilnya dicatat dan direkam langsung oleh Penulis. Setelah seluruh proses penelitian selesai, penulis selanjutnya mulai mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan kemudian dijelaskan. Analisis data adalah proses pencarian dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan pencatatan lapangan, dan dokumentasi tentang bagaimana mengatur data ke dalam kategori, disebar ke dalam unit-unit, pilih mana yang penting dan mana yang penting pelajari dan tarik kesimpulan agar mudah dipahami. Adapun Teknik pengumpulan data yang kami pakai dalam penelitian yaitu menggunakan Teknik observasi yang dilakukan disekolah SMPN 1 Percut Sei Tuan dan menggunakan wawancara kepada salah satu guru penggerak di dalam sekolah SMPN 1 Percut Sei Tuan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perumusan Kebijakan Pendidikan

Perumusan masalah kebijakan pendidikan dilakukan dengan mendefinisikan suatu masalah dan menghasilkan berbagai informasi mengenai kondisi-kondisi aktual yang menimbulkan masalah kebijakan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dan menguji konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah Pendidikan (Arwildayanto & Dkk, 2018). Sedangkan perumusan kebijakan pendidikan adalah suatu cara untuk dapat memutuskan suatu kendala yang dibentuk oleh aktor-aktor yang berwenang dalam membuat kebijakan dalam menghadapi kendala yang ada serta dari banyaknya cara alternatif yang ada maka dipilihnya alternatif kebijakan yang paling baik (Ambar Wati Ningsih, & Dkk, 2021).

Jadi, perumusan kebijakan pendidikan adalah proses merancang kebijakan atau rencana tindakan yang akan mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi dalam perumusan masalah. Ini melibatkan pengembangan strategi, program, dan tindakan konkret yang akan diambil untuk mengatasi isu-isu tersebut. Perumusan kebijakan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan panduan operasional yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

2. Pendekatan Perumusan Kebijakan Pendidikan

Menurut (Arif Rohman, 2009) pendekatan perumusan kebijakan dibagi menjadi dua yakni. Pertama pendekatan *Sosial demand approach*, pendekatan ini merupakan suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini para pengambil kebijakanaan lebih dahulu menyelami dan

mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya.

Kemudian yang kedua pendekatan *Man-Power Approach*. Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan.

Pada kebijakan peningkatan literasi disekolah SMPN 1 Percut Sei Tuan menggunakan pendekatan *Man-Power Approach* yang dimana tidak adanya tuntutan dari berbagai pihak, hanya saja bentuk keinginan dari kepala perpustakaan disekolah SMPN 1 Percut Sei Tuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam hal membaca buku.

3. Tahapan Perumusan Kebijakan

Merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah publik juga harus dikenali dengan baik pula. Kebijakan publik dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu dalam langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dengan adanya kesalahan yang diambil dalam perumusan masalah (*issue-issue*) akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah. Rushefky secara eksplisit menyatakan bahwa kita sering gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat dibandingkan menemukan masalah yang tepat (Winarno, 2008). Ada 4 syarat masalah bisa teridentifikasi sebagai sebuah isu kebijakan, diantaranya yaitu:

1. Disepakati banyak pihak
2. Memiliki prospek akan solusinya
3. Sejalan dengan pertimbangan politik
4. Sejalan dengan ideologi

Pada kebijakan peningkatan literasi disekolah SMPN 1 Percut Sei Tuan ini telah melalui berbagai tahapan dalam perumusan kebijakannya dan telah memenuhi syarat selama dibuat perumusan kebijakannya maupun pada implementasi dari kebijakan tersebut yang dimana salah satunya memiliki prospek yang Panjang, dalam hal ini peningkatan literasi membaca siswa telah meningkatkan minat baca para siswa. Hingga disekolah SMPN 1 Percut Sei Tuan memiliki perpustakaan memiliki akreditasi yang cukup baik dibanding sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Deli Serdang. Tercatat pada tahun ajar

2022-2023 perpustakaan di Sekolah SMPN 1 Percut Sei Tuan memiliki pengunjung sebanyak 42.548 pengunjung dan sekitar 17.297 proses peminjaman buku.

4. Aktor Dalam Perumusan Kebijakan

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut terbagi dalam:

1. Legislatif, Legislatif sering dimaksudkan sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Peran mereka sangat menentukan, karena pengesahan suatu tata aturan agar menjadi kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah ada ditangan mereka.
2. Eksekutif, Eksekutif disini adalah para pelaksana undang-undang sekaligus berperan dalam merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dibuat atau dirumuskan oleh legislatif dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional
3. Administrator, Administrator sebagai perumus dan implementator kebijakan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan Negara yang akan terimplementasikan dalam setiap program nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat, dengan tujuan utama masyarakat sejahtera.
4. Interest Group (kelompok berkepentingan), Yakni pemerintah dan politisi seringkali membutuhkan informasi yang disajikan kelompok terkait berbagai kepentingan, guna efektivitas pembuatan kebijakan pendidikan atau untuk menyerang oposisi terkait kondisi pelayanan pendidikan.
5. Organisasi Masyarakat (Ormas), Merupakan jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki hubungan krusial diantara Negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang muncul terkait dengan layanan pendidikan yang diterima masyarakat.

5. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Secara tradisional, literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat disebut penulis dalam pandangan ini adalah orang yang dapat membaca dan menulis atau buta huruf. Literasi kemudian berkembang menjadi keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Seiring berjalannya waktu, pengertian literasi telah bergeser dari pengertian yang sempit menjadi pengertian yang lebih luas yang mencakup berbagai bidang penting lainnya. Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perluasan makna akibat meluasnya penggunaan, kemajuan teknologi informasi, dan perubahan analogi (Yunus, 2017).

Perkembangan standar pembelajaran literasi sebenarnya sejalan dengan perkembangan fokus dan paradigma pembelajaran sastra. Dengan kata lain, perubahan fokus, paradigma, dan tujuan pembelajaran sastra berimplikasi pada perubahan standar pembelajaran literasi.

Fokus pembelajaran literasi yang pertama adalah teks. Fokus ini menetapkan bahwa standar utama yang ingin dicapai dalam pembelajaran sastra lebih ditekankan pada aspek kebahasaan suatu teks. Fokus literasi yang kedua adalah fokus berpikir. Fokus ketiga adalah fokus kelompok. Fokus ini menetapkan sejumlah standar untuk pembelajaran

literasi. Fokus keempat adalah pertumbuhan. Fokus ini menetapkan sejumlah standar pembelajaran literasi yang berbeda dari tiga standar lainnya.

Keberhasilan literasi di sekolah harus diupayakan melalui kegiatan yang menumbuhkan budaya literasi. Kegiatan tersebut mengacu pada lima aspek strategis yang telah ditetapkan:

- 1) Peningkatan Kapasitas Fasilitator
 - a. Pelatihan guru dan guru dalam menerapkan literasi dalam pembelajaran;
 - b. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan mainan edukatif berbasis literasi; Dan
 - c. Forum diskusi warga sekolah untuk mengembangkan kegiatan literasi dan meningkatkan literasi.
- 2) Peningkatan jumlah dan jangkauan sumber bacaan yang berkualitas
 - a. Penyediaan berbagai bahan bacaan non-pembelajaran;
 - b. Penyediaan alat dan mainan edukatif untuk menunjang kegiatan literasi;
 - c. penyediaan materi pembelajaran literasi dalam bentuk digital; Dan
 - d. program penulisan buku untuk siswa, guru, dan pendidik.
- 3) Memperluas Akses Sumber Belajar dan Cakupan Peserta Belajar
 - a. pengembangan fasilitas pendukung yang membentuk ekosistem kaya literasi;
 - b. Penyediaan laboratorium terkait literasi, misalnya laboratorium linguistik, ilmu pengetahuan, keuangan, dan digital;
 - c. Penyediaan sudut baca, baik di setiap ruang kelas maupun di lokasi-lokasi strategis di sekolah;
 - d. optimalisasi perpustakaan sekolah;
 - e. penyelenggaraan open house oleh sekolah yang telah mengembangkan literasi;
 - f. program pemindaian sekolah; Dan
 - g. Implementasi kampanye literasi.
- 4) Peningkatan hubungan masyarakat
 - a. melakukan sesi diskusi dengan tokoh atau aktivis dari berbagai bidang sastra tentang pengalaman dan pengetahuannya terkait bidang yang dikuasainya;
 - b. penyelenggaraan festival atau bulan literasi yang melibatkan para pakar, penggiat literasi, dan masyarakat umum; Dan
 - c. Kombinasi BUMN dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan dan kegiatan literasi di sekolah.
- 5) Penguatan Tata Kelola
 - a. Alokasi waktu atau jadwal khusus untuk melaksanakan berbagai kegiatan literasi di sekolah;
 - b. alokasi anggaran untuk mendukung literasi di sekolah;
 - c. pembentukan tim literasi sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, pengawas, guru, dan perwakilan orang tua siswa dengan tugas memantau kemajuan kegiatan literasi di sekolah;
 - d. mengembangkan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di sekolah untuk memaksimalkan keterlibatan seluruh warga sekolah; Dan
 - e. penguatan peran komite sekolah untuk membangun hubungan kerjasama dan komitmen terhadap kegiatan literasi.

Dalam kegiatan membaca ini peneliti melihat antusias minat membaca siswa dari sudut membaca. Mula-mula guru mendorong muridnya untuk mulai membaca. Akhirnya, siswa mulai menikmati membaca melalui sudut membaca. Minat membaca siswa ditandai

dengan keaktifan siswa dalam mengunjungi pojok baca serta membaca buku bacaan yang ada pada pojok baca tersebut.

Dalam hal ini perpustakaan kelas dikategorikan menjadi dua kategori: area membaca dan sudut membaca. Sudut membaca merupakan sudut yang berada di dalam kelas dan dilengkapi dengan koleksi buku untuk menarik dan menumbuhkan minat membaca siswa, sedangkan area membaca meliputi lingkungan sekolah berupa barbeque yang disertai dengan buku koleksi. Dalam pemanfaatannya, penanaman budaya literasi melalui sudut membaca kelas ini dilakukan setiap hari Senin dan Sabtu. Siswa dijadwalkan datang lebih awal pada pukul 06.30 dan melakukan kegiatan membaca bersama selama 30 menit. Selain itu, penggunaan sudut baca juga dilakukan pada saat istirahat dan pada saat pembelajaran yang melibatkan penggunaan sudut baca.

Dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan peningkatan literasi membaca disekolah SMPN 1 Percut Sei Tuan ini adalah kepala sekolah beserta para dewan guru, karyawan sekolah, dan juga pengurus komite sekolah. Hasil dari kebijakan pendidikan yang diputuskan secara musyawarah mufakat membawa dampak bagi seluruh warga sekolah diantaranya seluruh warga sekolah mempunyai kewajiban untuk mengikuti atau mentaati kebijakan pendidikan yang berlaku di sekolah tersebut. apabila terdapat tidak mengikuti atau mentaati kebijakan pendidikan yang berlaku akan dikenai sanksi yang telah disepakati bersama.

KESIMPULAN

Perumusan kebijakan merupakan tahap yang paling penting dan urgen sebab implementasi dan evaluasi dapat berjalan apabila tahap perumusan kebijakan telah selesai. Pada tahap perumusan kebijakan adalah mekanisme yang sebenarnya dalam memecahkan persoalan yang telah input dalam pemerintah. Ketidak sempurnaan dalam pengelolaannya yang dapat menyebabkan kegagalan suatu kebijakan sebagian besar bersumber pada perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan manganut sistem politik yang mengandalkan masukan dan dukungan dari kelompok yang berkepentingan.

Untuk melakukan perumusan kebijakan pendidikan di SMPN 1 Percut Sei Tuan para aktor kebijakan disekolah tersebut mengadakan koordinasi dengan dewan guru, karyawan dan juga komite sekolah. Perumusan kebijakan diadakan ketika rapat dinas di setiap awal semester. Metode yang digunakan dalam memutuskan kebijakan di SMPN 1 Percut Sei Tuan Patuk adalah dengan menggunakan metode musyawarah mufakat, apabila terdapat perbedaan pendapat antara para aktor maka dilakukan voting. Aktor-aktor yang berwenang dalam

merumuskan kebijakan pendidikan di SMPN 1 Percut Sei Tuan Patuk adalah kepala sekolah, para dewan gur, karyawan sekolah, serta juga komite sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fath, Z., Sholina, A., Isma, F., Rahmawan, D. I., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2018). SCHOOL LITERATION MOVEMENT POLICY (Concept and Implementation) KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH (Konsep dan Implementasi). 1(2), 331–344.
- Amiruddin, supiana, zaqiah. (2021) "Perumusan masalah kebijakan".jurnal um-palembang education. Vol 4,no 1: 26
- Arif Rohman. (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Arwidayanto, Sukung Arifin, Sumar Turmi Warmi, Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis dan Eksploratif, san Aplikatif, Bandung : Cv Cendikia Press
- Basyarahil, Abubakar. (2011)“Kebijakan Publik dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan”, (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara), Tahun II, Nomor 2 Juli
- Darsyah, S., & Chanifudin, C. (2020). Kebijakan Dalam Pendidikan. AT-Thullab: Journal of Islamic Studies, 1(1), 116-133.
- Fransiska Ayuka Putri Pradana. (2020). Pengaruh Budaya Literasi. Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 2(menerapkan budaya literasi), 81–85.
- Marsari, Hariani, gistiati. "Model perumusan kebijakan pendidikan".jurnal riset tindakan indonesia.vol 6, no 1(2021):90-93
- Rahman,dkk. "Formulasi kebijakan pendidikan". Jurnal kajian Islam kontemporer. Vol 13,no 1(2022): 50-5
- Risal M , M., Nurfadillah, & Zulfika. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Gerakan Literasi Sekolah. 1–14.
- Saadati, B. A., & Sadli, M. (2019). Analisis Pengembangan Budaya Literasi Dalam Meningkatkan Minat Membaca Siswa Di Sekolah Dasar. TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 6(2), 151–164. <https://doi.org/10.24042/terampil.v6i2.4829>
- Safitri, I., Marsidin, S., & Subandi, A. (2020). Analisis Kebijakan terkait Kebijakan Literasi Digital di Sekolah Dasar. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(2), 176–180. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.123>
- Yunus, A. (2017). Pembelajaran Literasi:Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca dan Menulis. Bumi Aksara.